

Lapangan Kerja Berkualitas dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

ruduct75@gmail.com

26 March 2026

LAPANGAN KERJA BERKUALITAS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas pentingnya lapangan kerja berkualitas sebagai inti dari pembangunan ekonomi Indonesia. Argumen pokoknya adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan tingkat pengangguran terbuka semata, tetapi dari kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, dan memungkinkan mobilitas sosial. Data terbaru menunjukkan bahwa pada November 2025 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,27 juta orang, dengan 147,91 juta orang bekerja, tingkat pengangguran terbuka 4,74 persen, dan rata-rata upah buruh Rp3,33 juta per bulan. Namun, proporsi pekerja formal pada Agustus 2025 baru 42,20 persen, sehingga mayoritas tenaga kerja masih berada dalam pekerjaan informal. Di sisi lain, kelompok muda masih menghadapi kerentanan tinggi, dengan tingkat pengangguran usia 15–19 tahun sebesar 23,34 persen dan usia 20–24 tahun sebesar 14,35 persen, sementara Youth NEET pada Agustus 2024 masih 20,31 persen atau sekitar 9 juta orang. Makalah ini menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan terutama kekurangan pekerjaan, melainkan kekurangan pekerjaan yang berkualitas. Karena itu, strategi pembangunan harus diarahkan pada pendalaman industrialisasi, pengurangan mismatch keterampilan, transisi sekolah-ke-kerja yang lebih baik, peningkatan partisipasi perempuan, perluasan perlindungan sosial, serta penciptaan pekerjaan baru melalui transformasi digital dan ekonomi hijau. Dengan demikian, lapangan kerja berkualitas harus diposisikan sebagai jembatan antara pertumbuhan ekonomi,

produktivitas nasional, dan kesejahteraan rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata Kunci

Lapangan kerja berkualitas, pembangunan ekonomi, pasar kerja Indonesia, pekerja formal, sektor informal, produktivitas tenaga kerja, bonus demografi, pengangguran pemuda, mismatch keterampilan, perlindungan sosial.

Pendahuluan

Salah satu ukuran paling penting dari keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya seberapa cepat produk domestik bruto bertumbuh, melainkan juga jenis pekerjaan apa yang diciptakan oleh pertumbuhan itu. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun bila mayoritas pekerjaannya tetap berada dalam pekerjaan berupah rendah, informal, tidak terlindungi, dan minim mobilitas sosial, maka pembangunan ekonomi tersebut belum sungguh-sungguh mentransformasikan kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai lapangan kerja berkualitas menjadi sangat penting karena negara ini sedang berada pada fase bonus demografi, transformasi digital, hilirisasi industri, dan transisi menuju ekonomi bernilai tambah yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, RPJMN 2025–2029 menempatkan peningkatan lapangan kerja berkualitas, produktivitas, dan penguatan SDM sebagai agenda inti pembangunan. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Data terbaru memperlihatkan gambaran yang bersifat ganda. Di satu sisi, pasar kerja Indonesia terus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada November 2025 jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, dengan 147,91 juta orang bekerja; Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,74 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 70,95 persen. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada triwulan III 2025, dengan sektor industri pengolahan tumbuh 5,54

persen dan informasi-komunikasi tumbuh 9,65 persen. Ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi nasional masih bergerak dan penciptaan kerja masih berlangsung. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun di sisi lain, kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan struktural. BPS mencatat bahwa pada November 2025 rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta per bulan. Pada Agustus 2025 proporsi pekerja formal baru mencapai 42,20 persen, sementara pada November 2025 pekerja formal berjumlah 62,57 juta orang atau 42,30 persen dari seluruh pekerja. Dengan kata lain, mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Bahkan pada Agustus 2025, proporsi pekerja penuh waktu tercatat 67,32 persen, pekerja paruh waktu 24,77 persen, dan setengah pengangguran 7,91 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan hanya pengangguran terbuka, tetapi juga pekerjaan yang rentan, tidak penuh, dan belum memberikan penghidupan layak. ([BPS Web API](#))

Makalah ini berargumen bahwa tantangan pembangunan ekonomi Indonesia pada dekade sekarang bukan sekadar menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya, melainkan menciptakan pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, terhubung dengan peningkatan keterampilan, serta mampu membawa rumah tangga naik kelas secara sosial-ekonomi. Dengan demikian, pembahasan mengenai lapangan kerja berkualitas harus ditempatkan di tengah relasi antara pertumbuhan, transformasi struktural, pendidikan, teknologi, industrialisasi, gender, dan ketimpangan wilayah. ([World Bank](#))

Makna Lapangan Kerja Berkualitas dalam Pembangunan

Istilah “lapangan kerja berkualitas” sering dipahami secara terlalu sederhana sebagai pekerjaan dengan gaji tinggi. Padahal, dari perspektif pembangunan, kualitas pekerjaan mencakup unsur yang lebih luas: produktivitas, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, peluang peningkatan keterampilan, keamanan kerja, dan kemampuan pekerjaan itu menghasilkan mobilitas sosial jangka panjang. Karena itu, pekerjaan berkualitas bukan hanya soal pendapatan bulan ini, tetapi juga soal masa

depan pekerja dan keluarganya. Ia harus cukup produktif untuk menopang pertumbuhan nasional, cukup aman untuk menjaga ketahanan rumah tangga, dan cukup dinamis untuk memungkinkan pekerja berpindah ke jenjang ekonomi yang lebih baik. ([World Bank](#))

Laporan Bank Dunia mengenai *Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia* menyajikan diagnosis yang sangat penting: Indonesia bukan terutama mengalami *jobless growth*, melainkan pertumbuhan yang terlalu banyak menciptakan pekerjaan berproduktivitas rendah. Dalam laporan itu disebutkan bahwa antara 2009–2019 Indonesia menciptakan rata-rata 2,4 juta pekerjaan baru setiap tahun, tetapi sebagian besar pekerjaan baru itu muncul di jasa berproduktivitas rendah yang tidak jauh lebih produktif daripada pertanian. Bank Dunia juga mencatat bahwa dari 85 juta pencari nafkah, hanya sekitar 13 juta atau 15 persen yang memperoleh penghasilan yang cukup untuk menopang standar hidup kelas menengah bagi keluarga beranggotakan empat orang. Yang lebih sempit lagi, hanya sekitar 3,5 juta pekerja upahan yang mencapai ambang penghasilan kelas menengah sekaligus memiliki manfaat sosial penuh dan kontrak kerja tidak terbatas. ([World Bank](#))

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, temuan itu sangat penting. Artinya, pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan apa saja belum tentu cukup untuk mendorong transformasi struktural. Lapangan kerja berkualitas adalah jembatan antara pertumbuhan makro dan kesejahteraan mikro. Bila jembatan itu rapuh, maka pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka agregat, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam kualitas hidup pekerja. Maka, tujuan pembangunan tidak boleh berhenti pada penurunan pengangguran terbuka; ia harus meluas ke peningkatan produktivitas, formalisasi usaha, perbaikan upah riil, perluasan jaminan sosial, dan akses terhadap keterampilan yang relevan. ([World Bank](#))

Potret Mutakhir Pasar Kerja Indonesia

Bila dilihat dari angka agregat terbaru, kondisi pasar kerja Indonesia tampak relatif stabil. Pada November 2025, BPS mencatat TPT sebesar 4,74

persen, turun 0,11 poin persentase dibanding Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang, sementara rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta. Dari sisi partisipasi, TPAK mencapai 70,95 persen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menyerap tenaga kerja di tengah ketidakpastian global. Pada periode yang sama, ekonomi tetap tumbuh positif di seluruh wilayah, dengan Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas rata-rata nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tetapi TPT bukan cermin tunggal kesehatan pasar kerja. Dalam siaran pers November 2025, BPS juga menunjukkan bahwa TPAK laki-laki sebesar 84,83 persen, jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,91 persen. Kesenjangan ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar potensi produktif perempuan Indonesia masih belum sepenuhnya termanfaatkan dalam pasar kerja. Pada sisi lain, tabel BPS tahun 2025 menunjukkan persentase tenaga kerja formal laki-laki 45,88 persen, sedangkan perempuan 36,66 persen. Dengan demikian, perempuan bukan hanya berpartisipasi lebih rendah, tetapi juga lebih sedikit berada dalam pekerjaan formal. ([BPS Web API](#))

Potret ketenagakerjaan Agustus 2025 menambahkan satu lapisan penting. BPS mencatat bahwa proporsi pekerja formal naik tipis dari 42,05 persen pada Agustus 2024 menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025. Namun, ini berarti sekitar 57,8 persen pekerja masih berada pada pekerjaan informal. Pada waktu yang sama, distribusi jam kerja menunjukkan bahwa hampir sepertiga pekerja belum berada dalam situasi kerja penuh. Ini penting karena kualitas kerja bukan hanya ditentukan oleh status formal-informal, tetapi juga oleh kecukupan jam kerja, stabilitas pendapatan, dan keterhubungan pekerjaan dengan jenjang karier yang lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Generasi muda menghadapi situasi yang lebih rentan lagi. Data BPS yang diperbarui pada Januari 2026 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 23,34 persen, dan pada kelompok usia 20–24 tahun sebesar 14,35 persen. Sementara itu, BPS

juga mencatat bahwa pada Agustus 2024 terdapat sekitar 20,31 persen pemuda usia 15–24 tahun yang berada dalam status NEET—tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan—setara sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. Walaupun angka NEET 2025 tersedia dalam tabel BPS, fakta 2024 saja sudah cukup menunjukkan bahwa transisi dari sekolah ke dunia kerja masih merupakan titik rawan pembangunan Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mengapa Lapangan Kerja Berkualitas Menjadi Kunci Pembangunan

Lapangan kerja berkualitas menentukan pembangunan melalui sedikitnya tiga saluran. Pertama, ia menentukan produktivitas nasional. Bappenas dalam narasi RPJMN 2025–2029 menyebut bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari PDB per tenaga kerja per tahun pada 2022 masih relatif rendah, yaitu sekitar US\$28.600 per pekerja. Produktivitas yang rendah berarti output yang dihasilkan per pekerja masih terbatas, sehingga ruang untuk kenaikan upah, perluasan basis pajak, dan peningkatan daya saing juga terbatas. Dalam ekonomi modern, produktivitas adalah jantung dari pertumbuhan jangka panjang. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Kedua, lapangan kerja berkualitas menentukan kemampuan rumah tangga untuk naik kelas. Bank Dunia menekankan bahwa Indonesia masih didominasi pertumbuhan pekerjaan berproduktivitas rendah, sementara dua pertiga pekerjaan berada di usaha rumah tangga yang nyaris semuanya informal. Dalam struktur seperti itu, rumah tangga mungkin bisa keluar dari kemiskinan ekstrem, tetapi tetap tertahan pada status “aspiring middle class” yang rentan terhadap guncangan. Ini menjelaskan mengapa pembangunan tidak cukup diukur dari berkurangnya kemiskinan saja; ukuran yang lebih dalam adalah berapa banyak rumah tangga yang memiliki pekerjaan stabil, tabungan, perlindungan sosial, dan prospek pendidikan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. ([World Bank](#))

Ketiga, lapangan kerja berkualitas menentukan stabilitas sosial dan legitimasi pembangunan. Negara yang gagal menyediakan pekerjaan layak

bagi kaum muda cenderung menghadapi frustrasi sosial, melemahnya kepercayaan terhadap institusi, dan membesarnya ekonomi informal yang sulit dipajaki serta sulit dilindungi. ILO dalam kajian global 2025 menegaskan bahwa pertumbuhan pekerjaan berkualitas melambat, sementara pengangguran pemuda dan kesenjangan gender tetap menjadi tantangan penting. Karena itu, pembangunan ekonomi yang sehat harus dibaca sebagai pembangunan yang memperluas *decent work*, bukan hanya ekspansi output. ([International Labour Organization](#))

Tantangan Struktural 1: Dominasi Informalitas dan Skala Usaha Kecil

Tantangan terbesar Indonesia adalah dominasi pekerjaan informal. Bahkan dokumen *Outlook Ketenagakerjaan 2026* dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa tingginya proporsi pekerja informal—sekitar 58 persen—mencerminkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi, sedangkan peluang pertumbuhan pekerjaan terbesar ke depan berada di sektor digital, energi hijau, dan industri pengolahan bernilai tambah. Dokumen itu juga menegaskan bahwa dominasi pekerjaan informal kemungkinan tetap tinggi bila tidak ada terobosan kebijakan besar untuk memperkuat sektor formal. ([Satudata Kemnaker](#))

Informalitas bukan sekadar soal status hukum usaha. Ia berkaitan dengan produktivitas, akses terhadap pembiayaan, akses pasar, kualitas manajemen, perlindungan sosial, dan penggunaan teknologi. Bank Dunia dalam dokumen 2026 mengenai informal sector menyebut bahwa akses terhadap pembiayaan dan alat digital di sektor informal Indonesia masih sangat rendah. Ketika usaha tetap kecil, tidak terdigitalisasi, tidak punya pembukuan baik, dan tidak punya relasi kuat dengan perusahaan yang lebih besar, maka pekerja di dalamnya sulit menikmati peningkatan produktivitas yang stabil. Dalam konteks ini, informalitas adalah masalah pembangunan industri, bukan hanya masalah ketertiban administrasi. ([World Bank](#))

Gambaran itu mudah dibayangkan melalui kisah sederhana. Bayangkan seorang pedagang makanan di kota kecil Jawa Tengah yang

mempekerjakan tiga orang kerabat. Usahanya hidup, pembeli ada, bahkan pendapatan hariannya cukup untuk bertahan. Namun ia tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi, tidak terhubung dengan rantai pasok formal, tidak terdaftar dalam jaminan sosial, dan tidak mudah mengakses kredit produktif. Dalam statistik, ia bekerja. Tetapi dalam logika pembangunan, pekerjaan seperti ini belum otomatis menjadi “pekerjaan berkualitas”, karena rapuh terhadap inflasi bahan baku, penurunan permintaan, sakit, atau guncangan keluarga. Tantangan Indonesia adalah mengangkat jutaan pekerjaan semacam ini dari sekadar bertahan menuju produktif dan terlindungi.

Tantangan Struktural 2: Skill Mismatch dan Lemahnya Kualitas SDM

Tantangan kedua terletak pada ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha. Bank Dunia mencatat bahwa 57 persen angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan setara SMP ke bawah. Laporan yang sama juga menyoroti lemahnya hasil belajar: seorang anak Indonesia yang masuk sistem pendidikan diperkirakan menyelesaikan 12,4 tahun sekolah, tetapi pembelajaran efektifnya setara hanya 7,8 tahun. Ini berarti persoalan Indonesia bukan hanya lama sekolah, tetapi mutu belajar dan relevansi keterampilan. ([World Bank](#))

Masalah mismatch ini tetap terasa pada 2025. Dalam *Indonesia Economic Prospects* Desember 2025, Bank Dunia menekankan bahwa intervensi yang ditargetkan untuk mengurangi *skills mismatches* dan memperbaiki kualitas pekerjaan sangat diperlukan, antara lain dengan memperkuat sistem informasi pasar kerja dan kebijakan pasar kerja aktif. Ini penting karena pasar kerja modern tidak cukup hanya dengan banyak lulusan; yang dibutuhkan adalah lulusan dengan kompetensi yang tepat, informasi lowongan yang transparan, dan ekosistem perpindahan kerja yang efisien. ([Open Knowledge Database](#))

Kementerian Ketenagakerjaan merespons sebagian masalah ini melalui revitalisasi BLK. Pada 2025, Menaker menegaskan bahwa revitalisasi BLK diarahkan menjadi pusat pelatihan modern berbasis *project-based learning*,

dengan fokus pada keterampilan digital dan teknologi masa depan seperti AI, IoT, dan Big Data. Arah ini tepat, tetapi skalanya harus jauh lebih besar. Masalah mismatch di Indonesia terlalu besar untuk diselesaikan hanya oleh sebagian pusat pelatihan; ia membutuhkan orkestrasi nasional antara pendidikan menengah, vokasi, politeknik, BLK, industri, dan pemerintah daerah. ([Kementerian Ketenagakerjaan](#))

Tantangan Struktural 3: Transisi Kaum Muda dari Sekolah ke Dunia Kerja

Jika ada kelompok yang paling menentukan masa depan pembangunan ekonomi Indonesia, kelompok itu adalah pemuda. Di sinilah bonus demografi bisa menjadi mesin pertumbuhan atau justru berubah menjadi tekanan sosial. Tingginya pengangguran usia 15–19 dan 20–24 tahun menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan semata jumlah lapangan kerja, tetapi kemampuan pasar kerja menyerap lulusan baru secara cepat dan bermakna. ILO juga mengingatkan bahwa transisi pemuda ke pekerjaan layak tetap menjadi prioritas kritis, karena bahkan ketika tingkat pengangguran turun, masa tunggu kerja dan kualitas pekerjaan pertama sering kali tetap buruk. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kajian ILO tentang youth employment di Indonesia menunjukkan bahwa 42 persen dari seluruh pemuda yang menganggur telah menganggur setidaknya 12 bulan; angkanya naik mendekati 52 persen untuk pemuda dengan pendidikan lebih tinggi. Temuan ini memperlihatkan paradoks penting: pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin transisi yang cepat bila struktur ekonomi belum cukup menciptakan pekerjaan bernilai tambah tinggi, dan bila informasi pasar kerja belum bekerja efektif. Dalam konteks ini, pengangguran terdidik bukan sekadar masalah individu, melainkan gejala ketidakselarasan antara sistem pendidikan dan struktur permintaan tenaga kerja. ([International Labour Organization](#))

Bayangkan seorang lulusan diploma di Makassar yang menguasai aplikasi dasar, punya sertifikat pelatihan, dan aktif mencari kerja selama berbulan-bulan. Ia tidak masuk statistik “tidak aktif”, karena ia memang mencari

pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang tersedia dekat tempat tinggalnya kebanyakan informal, berupah rendah, atau tidak terkait bidang yang ia pelajari. Maka ia menghadapi pilihan yang sulit: menerima pekerjaan apa saja, menunggu lebih lama, atau berpindah kota. Narasi seperti ini menggambarkan mengapa pembangunan ketenagakerjaan harus berbicara tentang kualitas *first job*, bukan sekadar jumlah lowongan.

Tantangan Struktural 4: Kesenjangan Gender dan Ekonomi Perawatan

Rendahnya partisipasi perempuan adalah tantangan besar lain. Data BPS November 2025 menunjukkan TPAK perempuan sebesar 56,91 persen, jauh tertinggal dari laki-laki 84,83 persen. Selain itu, persentase tenaga kerja formal perempuan pada 2025 hanya 36,66 persen, di bawah laki-laki yang mencapai 45,88 persen. Ini berarti ekonomi Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi produktif perempuan, dan ketika perempuan bekerja pun mereka relatif lebih banyak berada di pekerjaan yang kurang formal. ([BPS Web API](#))

Bank Dunia dalam *Indonesia Country Gender Assessment* telah lama menekankan bahwa target G20 untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan Indonesia menjadi sekitar 58,8 persen pada 2025 kemungkinan sulit tercapai dengan kebijakan yang ada saat itu. Kajian itu juga memperkirakan bahwa jika partisipasi kerja perempuan berhasil ditingkatkan sesuai komitmen tersebut, tambahan output ekonomi bisa mencapai sekitar US\$135 miliar per tahun pada 2025. Walaupun estimasi ini berasal dari kajian beberapa tahun lalu, pesan strategisnya tetap sangat relevan: memperluas kesempatan kerja perempuan bukan hanya agenda keadilan, tetapi juga agenda pertumbuhan ekonomi. ([World Bank](#))

Di Indonesia, rendahnya partisipasi kerja perempuan tidak bisa dijelaskan hanya oleh pendidikan atau preferensi pribadi. Ia terkait dengan beban kerja domestik, keterbatasan layanan penitipan anak, norma sosial, ketidakfleksibelan jam kerja, transportasi, dan terbatasnya lapangan kerja formal yang kompatibel dengan tanggung jawab perawatan. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang serius harus memasukkan ekonomi

perawatan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Bila tidak, maka separuh potensi produktif bangsa akan terus bekerja di bawah kapasitasnya.

Tantangan Struktural 5: Ketimpangan Wilayah dan Transformasi Struktural yang Belum Dalam

Pekerjaan berkualitas tidak tersebar merata di Indonesia. *Outlook Ketenagakerjaan 2026* menegaskan bahwa penciptaan pekerjaan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan, sehingga ketimpangan antarwilayah tetap menjadi ancaman. Pada saat yang sama, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi positif di seluruh wilayah pada triwulan III 2025, tetapi Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas rata-rata nasional. Artinya, kesempatan pertumbuhan memang meluas, tetapi kualitas dan kepadatan pekerjaan modern belum tersebar seimbang. ([Satudata Kemnaker](#))

Struktur sektoral juga masih menyisakan tantangan. BPS menunjukkan bahwa dalam setahun hingga Agustus 2025, tambahan tenaga kerja terbesar datang dari pertanian, akomodasi-makan minum, dan industri pengolahan. Ini penting. Pertanian tetap menjadi penyerap besar, tetapi produktivitasnya secara umum lebih rendah. Akomodasi dan makan minum menyerap tenaga kerja cepat, tetapi sering kali sangat heterogen dari sisi kualitas kerja. Industri pengolahan lebih menjanjikan karena historisnya terkait dengan kenaikan produktivitas, upah yang lebih baik, dan rantai pasok yang lebih formal. Karena itu, masa depan pekerjaan berkualitas di Indonesia sangat bergantung pada kedalaman industrialisasi, bukan hanya ekspansi jasa berupah rendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia memperkuat argumen ini dengan menilai bahwa perusahaan manufaktur asing menengah dan besar di Indonesia cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja dan membayar lebih tinggi dibanding perusahaan domestik, tetapi jumlahnya masih kurang prevalen dibanding negara pesaing regional yang lebih berhasil memanfaatkan FDI untuk pertumbuhan pekerjaan. Di titik ini terlihat bahwa kebijakan industri,

iklim investasi, logistik, dan integrasi ke rantai nilai global bukan isu yang terpisah dari kebijakan ketenagakerjaan. Semua itu justru merupakan prasyarat untuk memperluas pekerjaan menengah dan formal. ([World Bank](#))

Tantangan Struktural 6: Digitalisasi, Gig Economy, dan Transisi Hijau

Transformasi teknologi membawa peluang sekaligus risiko. Kementerian Ketenagakerjaan dalam *Outlook Ketenagakerjaan 2026* menekankan bahwa otomatisasi, AI, dan digitalisasi dapat menggantikan sebagian pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru di bidang analisis data, teknologi finansial, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Dokumen itu juga menyebut bahwa gig economy dan platform digital mengubah hubungan kerja konvensional dan menimbulkan tantangan pada regulasi kerja fleksibel, perlindungan sosial, dan literasi digital. ([Satudata Kemnaker](#))

Bappenas menambahkan dimensi lain melalui *Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia*, yang memuat tiga strategi utama: pembangunan ekosistem tenaga kerja hijau, peningkatan kesiapan tenaga kerja menuju pasar kerja hijau, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, masa depan pekerjaan berkualitas di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menghubungkan transformasi digital dengan transisi hijau. Bila berhasil, Indonesia dapat menciptakan pekerjaan baru yang lebih produktif dan tahan masa depan. Bila gagal, yang terjadi justru polarisasi: sebagian kecil pekerjaan baru berkeahlian tinggi tumbuh cepat, sementara sebagian besar pekerja tertinggal dalam pekerjaan informal berproduktivitas rendah. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Agenda Kebijakan: Dari Penciptaan Kerja ke Penciptaan Kerja Berkualitas

Langkah pertama yang perlu dilakukan Indonesia adalah menggeser orientasi kebijakan dari sekadar *job creation* ke *quality job creation*. Artinya, indikator keberhasilan tidak cukup berupa jumlah pekerja terserap, tetapi

juga berapa banyak yang masuk sektor formal, berapa yang memperoleh perlindungan sosial, berapa kenaikan produktivitas per pekerja, dan berapa proporsi pekerja muda yang masuk pekerjaan pertama yang relevan dengan keterampilannya. RPJMN 2025–2029 sudah bergerak ke arah itu dengan menempatkan peningkatan lapangan kerja berkualitas dan produktivitas sebagai prioritas pembangunan. Tantangannya adalah menurunkan prioritas itu menjadi desain kebijakan yang nyata di pusat dan daerah. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Langkah kedua adalah memperdalam industrialisasi dan transformasi struktural. Pekerjaan berkualitas tidak akan lahir dalam jumlah besar tanpa sektor-sektor yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi dan menyerap tenaga kerja secara luas. Karena itu, hilirisasi tidak boleh dibaca hanya sebagai peningkatan nilai ekspor komoditas, tetapi harus diterjemahkan ke dalam penciptaan pekerjaan manufaktur, logistik, teknisi, operator, supervisor, analis mutu, dan pekerjaan jasa penunjang yang lebih formal. Indonesia memerlukan strategi industri yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan keterkaitan dengan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, dan upgrading teknologi domestik. ([World Bank](#))

Langkah ketiga adalah mendorong formalisasi usaha secara bertahap dan realistis. Formalisasi tidak boleh dipahami sebagai paksaan administratif yang membebani usaha mikro. Ia harus didesain sebagai proses naik kelas: pencatatan digital sederhana, akses kredit yang lebih baik, insentif pajak awal yang ringan, keikutsertaan dalam pengadaan pemerintah, pendampingan manajerial, dan integrasi ke rantai pasok yang lebih besar. Bagi jutaan usaha kecil, formalitas harus terasa sebagai pintu menuju keuntungan, bukan semata pintu menuju beban. Di sinilah agenda UMKM, digitalisasi, dan kebijakan ketenagakerjaan seharusnya bertemu. ([World Bank](#))

Langkah keempat adalah memperkuat ekosistem *skills development* yang terhubung dengan permintaan industri. BLK yang lebih modern adalah awal yang baik, tetapi tidak cukup. Indonesia memerlukan sistem yang

menghubungkan sekolah menengah, politeknik, universitas, BLK, asosiasi industri, kawasan industri, dan platform informasi kerja. Bank Dunia secara khusus menekankan pentingnya penguatan *labour market information systems*, dan Kemnaker sudah memiliki Pasker ID serta SIPK yang menyediakan data dan tren pasar kerja. Tugas berikutnya adalah memastikan data itu benar-benar dipakai untuk perencanaan kurikulum, pelatihan ulang, dan penempatan kerja. ([Open Knowledge Database](#))

Langkah kelima adalah memberi perhatian khusus pada transisi pertama kaum muda ke dunia kerja. Indonesia perlu memikirkan skema yang lebih agresif untuk *first-job transition*: magang berkualitas yang diawasi, subsidi perekrutan pertama untuk lulusan baru, penguatan konseling karier di sekolah dan kampus, serta kemitraan dengan perusahaan lokal dan nasional. Pasar kerja tidak selalu bekerja efisien bagi lulusan baru, sebab pengalaman kerja sering diminta untuk pekerjaan yang justru dibutuhkan sebagai pengalaman pertama. Tanpa intervensi negara dan dunia usaha, hambatan awal ini dapat menjadi perangkap jangka panjang bagi generasi muda.

Langkah keenam adalah menjadikan partisipasi kerja perempuan sebagai agenda ekonomi inti. Kebijakan yang dibutuhkan bukan hanya pelatihan, tetapi juga dukungan terhadap layanan penitipan anak, pengaturan kerja yang fleksibel namun tetap terlindungi, transportasi yang aman, dan insentif bagi perusahaan yang memperluas rekrutmen perempuan ke posisi bernilai tambah. Dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi dan kualitas kerja perempuan akan memperbesar pendapatan rumah tangga, memperluas basis konsumsi, memperkuat investasi pendidikan anak, dan menaikkan potensi pertumbuhan nasional. ([BPS Web API](#))

Langkah ketujuh adalah memperluas perlindungan sosial pekerja. Reformasi JKP pada 2025 penting dibaca dalam kerangka ini. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa aturan baru meningkatkan manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari gaji yang dilaporkan selama enam bulan, dengan batas upah maksimal Rp5 juta, berlaku sejak 7 Februari

2025. Ini adalah langkah maju karena transisi antarpekerjaan membutuhkan jaring pengaman. Namun tantangan berikutnya adalah cakupan: pekerja informal, pekerja platform, dan pekerja dengan hubungan kerja nonstandar sering kali justru paling membutuhkan perlindungan, tetapi paling sulit dijangkau. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

Langkah kedelapan adalah membangun strategi ketenagakerjaan yang lebih teritorial. Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk dikelola dengan satu resep nasional yang seragam. Kota industri seperti Bekasi, Karawang, Batam, dan Gresik memerlukan strategi berbeda dari daerah pertanian, pariwisata, atau daerah berbasis pertambangan. Karena itu, agenda lapangan kerja berkualitas harus diterjemahkan ke dalam *local job strategy*: pemetaan sektor unggulan, kebutuhan keterampilan wilayah, proyeksi investasi, pola migrasi tenaga kerja, dan skema pelatihan spesifik daerah. Di titik ini, data BPS, SIPK Kemnaker, dan perencanaan Bappeda harus benar-benar bertemu dalam satu meja kebijakan. ([Pasker ID](#))

Penutup

Indonesia memasuki dekade penting. Bonus demografi masih memberikan jendela kesempatan, ekonomi masih tumbuh di kisaran lima persen, digitalisasi terus meluas, dan hilirisasi serta transisi hijau membuka kemungkinan baru. Akan tetapi, semua peluang itu tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan bila pasar kerja tetap didominasi pekerjaan informal, berproduktivitas rendah, dan minim perlindungan. Data terbaru menunjukkan bahwa pengangguran terbuka memang menurun, tetapi mayoritas pekerja masih berada di luar sektor formal; perempuan masih tertinggal dalam partisipasi dan formalisasi; dan kaum muda masih menghadapi transisi sekolah-ke-kerja yang rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, inti tantangan pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya bagaimana menumbuhkan ekonomi, tetapi bagaimana membuat pertumbuhan itu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Lapangan kerja berkualitas harus menjadi poros yang menghubungkan kebijakan industri,

pendidikan, investasi, UMKM, jaminan sosial, digitalisasi, dan pembangunan daerah. Tanpa poros itu, Indonesia berisiko memiliki pertumbuhan yang cukup baik tetapi tidak cukup transformatif. Dengan poros itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengubah bonus demografi menjadi bonus produktivitas, dan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kemajuan sosial yang lebih nyata bagi jutaan pekerja dan keluarganya. ([World Bank](#))

Glosarium

Lapangan kerja berkualitas

Pekerjaan yang tidak hanya menyediakan pendapatan, tetapi juga produktif, relatif stabil, memiliki perlindungan, peluang peningkatan keterampilan, dan kapasitas untuk mendorong mobilitas sosial rumah tangga. Gagasan ini sejalan dengan analisis Bank Dunia tentang kebutuhan Indonesia untuk menciptakan *middle-class jobs* dan dengan kerangka ILO tentang pekerjaan layak. ([World Bank](#))

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pada November 2025, TPT Indonesia tercatat 4,74 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yaitu bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada November 2025, TPAK Indonesia tercatat 70,95 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerja formal

Pekerja yang berada dalam hubungan kerja atau bentuk usaha yang relatif lebih teratur, umumnya memiliki struktur kerja yang lebih jelas, dan lebih berpeluang memperoleh perlindungan kerja maupun sosial. BPS mencatat

proporsi pekerja formal Indonesia 42,20 persen pada Agustus 2025; untuk 2025, proporsi tenaga kerja formal laki-laki 45,88 persen dan perempuan 36,66 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerja informal

Pekerja yang berada di luar hubungan kerja formal atau usaha formal yang mapan, umumnya dengan tingkat perlindungan, kestabilan pendapatan, dan produktivitas yang lebih rendah. Karena pekerja formal baru 42,20 persen pada Agustus 2025, berarti mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

NEET (Not in Employment, Education, and Training)

Kelompok pemuda yang tidak bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan. BPS menyebut Youth NEET Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 20,31 persen atau sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati](#))

Mismatch keterampilan

Keadaan ketika kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bank Dunia menekankan perlunya intervensi untuk mengurangi *skills mismatches* agar kualitas pekerjaan Indonesia meningkat. ([Open Knowledge Database](#))

Bonus demografi

Fase ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibanding kelompok usia nonproduktif. Kondisi ini dapat menjadi peluang pertumbuhan bila tersedia pekerjaan yang produktif dan berkualitas, tetapi dapat berubah menjadi tekanan sosial bila pasar kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja muda dengan baik. Agenda ini tersirat kuat dalam RPJMN 2025–2029 dan Outlook Ketenagakerjaan 2026. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Pekerjaan hijau (green jobs)

Pekerjaan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan berkelanjutan. Bappenas menyusun peta jalan

pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia sebagai panduan menyiapkan tenaga kerja untuk sektor-sektor tersebut. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang terkena PHK. Berdasarkan aturan baru yang berlaku sejak 7 Februari 2025, manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari upah yang dilaporkan selama paling lama enam bulan, dengan batas upah tertentu. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

BLK (Balai Latihan Kerja)

Lembaga pelatihan kerja yang disiapkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pada 2025, Kemnaker menekankan revitalisasi BLK menuju model pelatihan yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan. ([Kementerian Ketenagakerjaan](#))

Daftar Pustaka APA 7

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Siaran pers Badan Pusat Statistik: Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia November 2025*. ([BPS Web API](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, January 30). *Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Bappenas. (2025). *Narasi RPJMN Tahun 2025–2029*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Bappenas. (2025). *Peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

BPJS Ketenagakerjaan. (2025, February 21). *Aturan baru JKP dan JKK 2025: Perlindungan JKP naik, iuran JKK diskon 50 persen*. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

International Labour Organization. (2025). *World Employment and Social Outlook: Trends 2025*. ([International Labour Organization](#))

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025, April 14). *Menaker: SDM unggul jadi kunci masa depan industri Indonesia*. ([Kementerian Ketenagakerjaan](#))

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Outlook ketenagakerjaan 2026*. ([Satudata Kemnaker](#))

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). *Snapshot statistik ketenagakerjaan nasional*. ([Satudata Kemnaker](#))

World Bank. (2021). *Pathways to middle-class jobs in Indonesia*. ([World Bank](#))

World Bank. (2021). *Indonesia country gender assessment: Investing in opportunities for women*. ([World Bank](#))

World Bank. (2025, December). *Indonesia economic prospects*. ([Open Knowledge Database](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 26 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c4a7a4-5990-83a0-9859-aa77e7f9c682>